

TESIS

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BERDASARKAN
FUNGSI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN GOWA**

***THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE ON
EDUCATION, HEALTH AND PROTECTION SOCIAL
FUNCTIONS ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX THROUGH
THE ECONOMIC GROWTH IN GOWA REGENCY***

Disusun dan diajukan oleh

IKBAL

A052171006



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SUMBER DAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BERDASARKAN
FUNGSI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN GOWA**

***THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE ON
EDUCATION, HEALTH AND PROTECTION SOCIAL
FUNCTIONS ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX THROUGH
THE ECONOMIC GROWTH IN GOWA REGENCY***

Disusun dan diajukan oleh

IKBAL

A052171006



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SUMBER DAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BERDASARKAN FUNGSI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN GOWA

Disusun dan diajukan oleh

IKBAL
A052171006

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ekonomi Sumber Daya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin pada tanggal 5 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



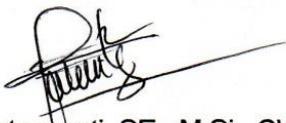
Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA.
NIP 19630625 198702 2 004

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM.
NIP 19770119 200801 2 008

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi Sumber Daya



Dr. Fatmayati, SE., M.Si., CWM.
NIP 19640106 198803 2 001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM., CWM.
NIP 19640205 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikbal
NIM : A052171006
Program Studi : Ekonomi Sumber Daya
Jenjang : S2

Menyatakan dengan bahwa karya tulisan saya berjudul:

“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gowa”

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 5 Februari 2021



Yang membuat pernyataan,

Ikbal

PRAKATA

Alhamdulillahirrabbi'lalamiin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, salam beserta shalawat senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW atas sunnah dan petunjuknya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis yang merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE.,M.Si selaku tim penasihat atas waktu dan perhatian yang telah diberikan untuk membimbing, memberi motivasi, saran dan kritik kepada peneliti selama proses penulisan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Paulus Uppun, SE., MA, Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA, Ibu Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si sebagai tim penguji yang telah memberikan saran dalam penelitian tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Fatmawati, S.E., M.Si. selaku ketua Program Studi Magister Ekonomi Sumber Daya Universitas Hasanuddin atas bimbingan dan arahnya kepada penulis. Dan ucapan terima kasih pula buat seluruh dosen dan staf Program Studi Ekonomi Sumber daya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan pembekalan pengetahuan kepada penulis, sehingga memudahkan dalam proses penyusunan tesis ini.

Ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada kedua orang tua dan Istriku yang tercinta atas segala bentuk dukungan, doa, motivasi tak terhingga yang senantiasa tercurah, begitupun adikku tercinta, kerabat dan orang terkasih lainnya, serta sahabat seperjuangan di Program Studi Ekonomi Sumberdaya angkatan 2017. Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda atas kebaikan yang diberikan selama ini. Akhirnya penulis mengakui bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran dibutuhkan untuk menyempurnakan tesis ini.

Makassar, 5 Februari 2021

Penulis

ABSTRAK

IKBAL. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Rahmatia dan Nur Dwiana Sari Saudi).*

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gowa.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data secara kuantitatif berupa data *time series* dari tahun 2005-2019 dengan menggunakan analisis model struktural.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran fungsi pendidikan secara langsung berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia dan secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa. Pengeluaran fungsi kesehatan secara langsung berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia dan secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa. Pengeluaran fungsi perlindungan sosial secara langsung berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia dan secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa.

Kata kunci: pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, pengeluaran perlindungan sosial, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia



ABSTRACT

IKBAL. *The Influence of Government Expenditure on Education, Health and Social Protection Functions on the Human Development Index through Economic Growth in Gowa Regency* (supervised by **Rahmatia** and **Nur Dwiana Sari Saudi**)

The purpose of this study is to analyze the effect of government spending based on the function of education, health and social protection on the human development index through economic growth in Gowa regency.

The data analysis technique used in this research was quantitative data in the form of time series data from 2005-2019 using structural model analysis.

The results showed that the education function expenditure had a negative direct effect on the human development index and indirectly had a negative effect on the human development index through economic growth in Gowa Regency. Expenditures for health functions directly have a positive effect on the human development index and indirectly have a positive effect on the human development index through economic growth in Gowa Regency. Expenditures for social protection functions directly have a positive effect on the human development index and indirectly have a negative effect on the human development index through economic growth in Gowa Regency.

Keywords: education expenditure, health expenditure, social protection expenditure, economic growth, human development index



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II PEMBAHASAN	13
2.1. Tinjauan Teoritis.....	13
2.1.1. Teori Indeks Pembangunan Manusia	13
2.1.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi	15
2.1.3. Teori Pengeluaran Pemerintah	18
2.2. Hubungan Antar Variabel.....	23
2.2.1. Hubungan Pengeluaran Pendidikan Terhadap IPM.....	23
2.2.2. Hubungan Pengeluaran Kesehatan Terhadap IPM	26
2.2.3. Hubungan Pengeluaran Perlindungan Sosial Terhadap IPM.....	31

2.2.4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	35
2.3. Tinjauan Empiris.....	40
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	47
3.1. Kerangka Konseptual.....	47
3.2. Hipotesis.....	50
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	51
4.1. Lokasi dan Rancangan Penelitian	51
4.2. Jenis dan Sumber Data.....	51
4.3. Metode Pengumpulan Data	52
4.4. Metode Analisis Data	52
4.5. Defenisi Operasional.....	55
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	56
5.1. Deksripsi Data	56
5.1.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa.....	56
5.1.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa	59
5.1.3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan Kabupaten Gowa	61
5.1.4. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan Kabupaten Gowa	65
5.1.5. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Perlindungan Sosial Kabupaten Gowa	68
5.2. Hasil Penelitian.....	73
5.3. Pembahasan	79
5.3.1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan dan Fungsi Perlindungan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gowa	79
5.3.2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa.....	82

5.3.3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa.....	86
5.3.4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Perlindungan Sosial Terhadap Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa	87
5.3.5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa.....	89
BAB VI PENUTUP	91
6.1. Kesimpulan	91
6.2. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Ringkasan Studi Empiris	40
Tabel 5.1. Perkembangan Indeks pembangunan Manusia Kabupaten Gowa Tahun 2005-2019	57
Tabel 5.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa Tahun 2005-2019	60
Tabel 5.3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2005-2019.....	62
Tabel 5.4. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 2005-2019.....	66
Tabel 5.5. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Perlindungan Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2005-2019.....	69
Tabel 5.6. Hasil Analisis Hubungan Antar Variabel	74
Tabel 5.7. Hasil Estimasi Koefisien Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Antar Variabel.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perbandingan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 – 2018.....	2
Gambar 3.1	Kerangka Pikir	49
Gambar 5.1	Bagan Kerangka Hasil Penelitian.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Regresi Variabel Tesis Kabupaten Gowa	100
Lampiran 2	Data Regresi Logaritma Natural (ln) Kabupaten Gowa	101
Lampiran 3	Pengeluaran Fungsi Pendidikan Beserta Sub Fungsi	102
Lampiran 4	Pengeluaran Fungsi Kesehatan Beserta Sub Fungsi.....	103
Lampiran 5	Pengeluaran Fungsi Kesehatan Beserta Sub Fungsi.....	104
Lampiran 6	Pengeluaran Fungsi Perlindungan Sosial Beserta Sub Fungsi.....	105
Lampiran 7	Output Regresi Menggunakan Program Amos	106

BAB I

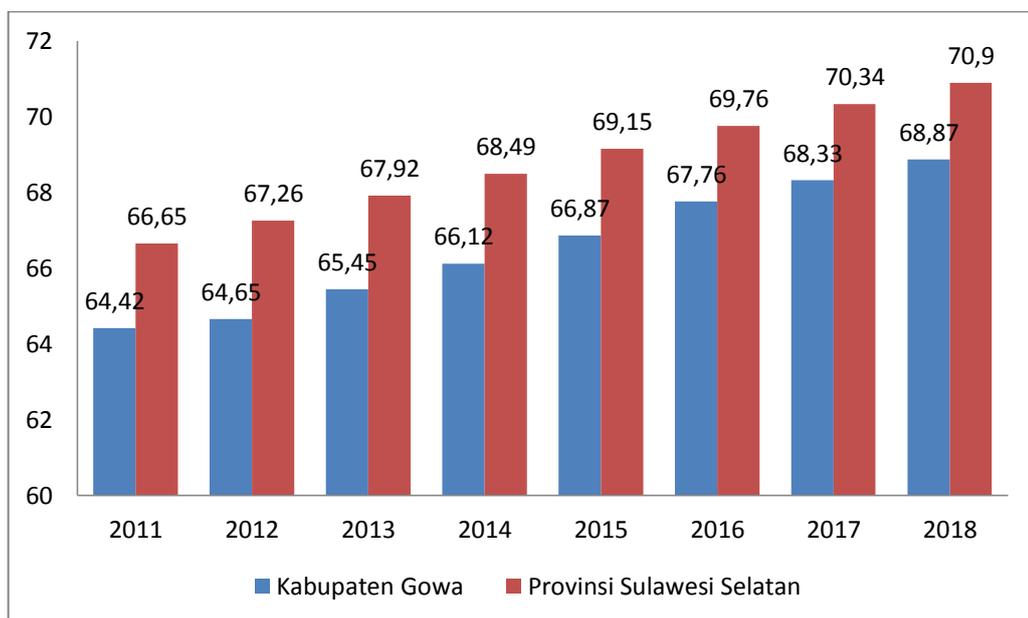
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu tujuan suatu negara maupun wilayah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pembangunan meliputi berbagai aspek yaitu ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lainnya. Salah satu pembangunan yang penting adalah pembangunan manusia yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan komponen utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, UNDP (United Nations Development Programme) membentuk indikator bernama *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak pengukuran IPM diberlakukan, orientasi pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih kepada manusia sebagai elemen dasar untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Badrudin, 2011).

Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia karena dimensinya sangat luas, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi dari pembangunan manusia melalui tiga indikator utama yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan (Ardiansyah, 2018). Secara teknis, IPM memberikan suatu ukuran gabungan pada tiga dimensi, yaitu: (i) umur panjang dan hidup sehat (*life expectancy at birth*); (ii) pengetahuan (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa (*mean years schooling*); serta (iii) standar hidup layak (*purchasing power parity*) (Mahulauw, 2016).

Indeks pembangunan manusia memberi wawasan pembangunan yang lebih luas karena pembentukannya didesain untuk memfokuskan perhatian pada aspek pembangunan kesehatan dan pendidikan, sehingga bisa mengetahui perbandingan kinerja pembangunan manusia antar negara maupun antar daerah (Kuncoro, 2013).



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2018

Gambar 1.1 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gowa dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2018

Berdasarkan **Gambar 1.1** menunjukkan angka IPM Kabupaten Gowa pada tahun 2011 sebesar 64,42 dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 sebesar 68,90. Selama periode 2011 hingga 2018 indeks pembangunan manusia Kabupaten Gowa menunjukkan kemajuan, tetapi status pembangunan manusia Kabupaten Gowa masih pada level sedang, dan masih dibawah angka IPM provinsi. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2011 sampai 2018 angka IPM provinsi lebih tinggi dibandingkan IPM Kabupaten Gowa. Pada tahun 2018, angka IPM Gowa mencapai 68,87

sedangkan angka IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 70,90 (Badan Pusat Statistik, 2018).

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa dengan setiap tahun mengalami peningkatan tersebut, ternyata IPM Kabupaten Gowa belum mampu masuk pada peringkat 10 besar diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Tahun 2018, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Kota Makassar, Palopo, dan Pare-pare menempati urutan pertama, kedua dan ketiga IPM tertinggi, sedangkan Kabupaten Gowa berada di urutan ke-11 dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. (Badan Pusat Statistik, 2018).

Berdasarkan kategori yang diberikan oleh UNDP, yakni capaian pembangunan manusia dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), kategori rendah ($IPM < 60$). Maka, capaian pembangunan manusia di Kabupaten Gowa pada periode 2011 – 2018 termasuk dalam kategori sedang (UNDP, 1966). Oleh sebab itu dibutuhkan kontribusi pemerintah untuk meningkatkan modal manusia yang kompetitif dan mampu menjadi daerah dengan kategori IPM dengan level yang lebih baik sekaligus meningkatkan pembangunan ekonomi.

Tinggi rendahnya nilai IPM yang dicapai oleh setiap Negara atau daerah tentu tidak terlepas dari peran pemerintah, khususnya dalam kebijakan fiskal yang berkaitan dengan kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sebagaimana dikemukakan oleh Wolfson dalam Suparmoko bahwa, kebijakan fiskal (*fiscal policy*) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui

kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan (Lilik, 2008).

Klasifikasi pengeluaran Pemerintah dalam bentuk belanja menurut fungsi terdiri dari Sembilan fungsi yaitu pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di dalam pasal 33). Di antara fungsi tersebut, tanpa mengesampingkan fungsi yang lain, terdapat tiga fungsi yang perlu diteliti terlebih melihat pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi yaitu fungsi pendidikan dan kesehatan dan perlindungan sosial. Pengeluaran pemerintah yang ditunjukkan pada fungsi tertentu dapat menciptakan *multiplier* ekonomi melalui agregat permintaan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu dibutuhkan kontribusi pemerintah, salah satunya melalui alokasi pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja menurut fungsi yang tepat.

Model pembangunan yang dikembangkan Rostow dan Musgrave dalam Guritno (1993), terdapat hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar. Sebab, pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan, namun pada tahap ini peran swasta juga semakin diperlukan. Pada tahap

menengah pengeluaran pemerintah dan swasta sedikit beralih pada sektor-sektor lain misalnya industri, namun pengeluaran pemerintah dan swasta ini tidak menyampingkan kepentingan publik seperti kesehatan dan pelayanan sosial. Pada tingkat pembangunan ekonomi lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya (Guritno, 1993).

Kaitan antara pengeluaran untuk sektor publik terhadap pembangunan manusia sebenarnya mudah untuk ditelusuri. Pengeluaran untuk bidang kesehatan diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup maupun menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai salah satu komponen dalam penentuan pembangunan manusia. Anggaran dalam bidang pendidikan akan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga mampu meningkatkan angka harapan lama sekolah (Akbar, 2016). Anggaran dalam bidang bantuan sosial dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Efektifitas kebijakan fiskal daerah pada pengeluaran pemerintah 3 faktor, pengeluaran bidang kesehatan, pengeluaran bidang pendidikan, pengeluaran untuk bantuan sosial membuat suatu daerah mengalami kemajuan, begitu juga dengan sumber daya manusianya yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Akbar, 2016).

Menurut Meier dan Rauch pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan,

menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak.

Berdasarkan berita resmi statistik, Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Kabupaten Gowa secara proporsi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dapat kita lihat pada tahun 2011 sebesar 415,561 milyar dan tahun 2018 meningkat sebesar 496,775 milyar. Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan Kabupaten Gowa yang begitu besar, perlu mewujudkan proses kegiatan pendidikan yang berbobot dan hasil yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan pendidikan.

Bentuk perwujudan dan respon positif atas hadirnya paket reformasi pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten Gowa mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan yaitu Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, kebijakan ini mulai disosialisasikan pada tahun 2011 dibawah kepemimpinan Ihsan Yasin Limpo, dan mulai dilaksanakan pada tahun 2012, lalu pada tahun 2013, kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 10 tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB). Kini dibawah kepemimpinan Adnan Purictha Ihsan Yasin Limpo pelaksanaannya telah merata disetiap tingkatan pendidikan dasar, mulai SD, SMP, hingga SMA/SMK di Kabupaten Gowa. Hadirnya kebijakan ini tidak lepas dari perdebatan dan pertimbangan untuk memajukan kualitas pendidikan dan memenuhi hak masyarakat untuk mengakses pendidikan dengan mudah (Harakan, 2017)

Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan sebagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa di bidang pendidikan, menitikberatkan pada transfer ilmu dan pengetahuan secara komprehensif dan tuntas kepada setiap peserta yang mengikuti pembelajaran dan pendidikan, menempatkan peserta didik sebagai subjek bukan sebagai objek dalam proses belajar mengajar, dan memberikan pengalaman belajar yang mampu mengembangkan potensi anak didik secara maksimal sehingga menghasilkan insan yang produktif (Harakan, 2017).

Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat suatu daerah juga dapat kita lihat dari bagaimana masyarakat tersebut mendapatkan akses dan bagaimana sarana prasarana sektor kesehatan di daerah tersebut. Menurut Tjiptoherijanto (1989) bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut telah diteliti oleh Javar, Abbasian dan Sahar (2002) bahwa terdapat korelasi positif antara pengeluaran kesehatan pemerintah terhadap IPM.

Akses dan sarana prasarana kesehatan dapat dilihat dari bagaimana kepedulian pemerintah terhadap sektor kesehatan tersebut melalui data belanja pemerintah pada sektor kesehatan (Salsabila, 2019). Belanja pemerintah Kabupaten Gowa fungsi kesehatan secara proporsi cukup besar setiap tahunnya. Berdasarkan berita resmi statistik, pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan pada tahun 2011 sebesar 90,135 milyar dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 246,838. Besaran proporsi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Gowa dalam membangun manusianya.

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar disuatu wilayah. Kesehatan inti dari kesejahteraan, sementara pendidikan adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang layak dan berharga. Kedua faktor tersebut mendasar untuk membentuk kemampuan manusia, di mana ini adalah inti dari signifikansi pembangunan (Todaro dan Smith, 2006). Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif (Sunartomo, W. 2014).

Rumah tangga masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti: makanan, kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya. Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin (Ginting, 2008).

Kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah (Sunartomo, W. 2014). Pernyataan di atas sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh mittal pada tahun 2016 yang mengungkapkan bahwa pengeluaran sektor sosial berdampak positif terhadap indeks pembangunan manusia di Negara-negara bagian India (mittal, 2016).

Pendalaman kasus pengeluaran pemerintah dan tingkat IPM sangat relevan dengan studi kasus di Provinsi Maluku. Maluku merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan pernah di atas nasional (Panel A). Namun demikian, hasil pengukuran IPM Provinsi Maluku masih sangat rendah (Panel B). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku yang tinggi sangat kontradiktif dengan IPM Maluku yang selalu di bawah nasional. Data ini menggambarkan bahwa kinerja pembangunan manusia di Provinsi Maluku belum mencapai tingkat yang optimal (Mahulau, 2016). Menurut UNDP, paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu : (1) Produktifitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan

pekerjaan berubah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia (UNDP, 1995).

Dari hasil penelitian Ramirez dkk (1998) dengan data cross-country (1970-1992), menemukan adanya hubungan positif yang kuat antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial dan pendidikan terbukti pula mempunyai peran penting sebagai penghubung yang menentukan kekuatan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, sedangkan tingkat investasi dan distribusi pendapatan adalah penguat hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Studi ini yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi turut memberi andil dalam memperkuat pembangunan manusia melalui pembangunan ekonomi (A Wahid, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, menarik diteliti mengenai **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Fungsi Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Gowa Pada Periode 2005-2019”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh langsung terhadap indeks pembangunan manusia dan tidak langsung tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa.
2. Apakah pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh langsung terhadap indeks pembangunan manusia dan tidak langsung tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa.
3. Apakah pengeluaran pemerintah fungsi perlindungan sosial berpengaruh langsung terhadap indeks pembangunan manusia dan tidak langsung tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui berapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui berapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa.

3. Untuk menganalisis dan mengetahui berapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi perlindungan sosial terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa.

a. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara umum hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dalam melengkapi kajian tentang kemiskinan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sebuah rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi kebijakan khususnya yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia pada hakikatnya adalah memperluas pilihan bagi masyarakat dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan tiap-tiap anggota masyarakat sehingga pembangunan manusia dalam hal ini juga mencakup berbagai aspek lainnya yaitu selain aspek ekonomi terdapat pula aspek sosial, politik, budaya serta aspek lainnya untuk menjadikan manusia lebih produktif dalam berkegiatan. Dengan demikian paradigma pembangunan manusia mencakup dua sisi yaitu berupa informasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik (Sunartomo, W. 2014).

Aspek pembangunan manusia ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia ini merupakan salah satu alternatif pengukuran pembangunan selain menggunakan Gross Domestic Bruto. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak (Sunartomo, W. 2014).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 adalah sebuah rata-rata sederhana dalam tiga dimensi yang mengukur pencapaian di suatu negara terkait "Hidup yang panjang

dan sehat”, yang diukur dengan harapan hidup saat lahir, “Pengetahuan”, sebagaimana diukur dengan tingkat melek huruf orang dewasa dan dikombinasikan dengan rata-rata lama sekolah dan “Standar kehidupan yang layak”, yang diukur dengan taksiran penghasilan yang diperoleh di Paritas Daya Beli (PPP) US \$ (Mittal, 2016).

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia (Kahang, 2016).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengaplikasikan penghitungan IPM tersebut untuk melihat kemajuan pembangunan manusia di Indonesia baik pada level provinsi maupun level kabupaten/kota. BPS melakukan beberapa penyesuaian pada penghitungan IPM, yaitu pada komponen pendidikan dan ekonomi. Pada komponen pendidikan, BPS menggunakan MYS bukan Angka Partisipasi Sekolah (APS) karena APS merupakan indikator input, sementara MYS merupakan indikator output yang lebih mampu menggambarkan pencapaian di bidang pendidikan. Kemudian pada komponen ekonomi, BPS menggunakan PPP dengan pendekatan pengeluaran per kapita per tahun disesuaikan karena lebih mampu menggambarkan daya beli masyarakat dibandingkan dengan *Gross Domestic Product* (GDP) (Kahang, 2016).

Pembangunan manusia adalah sebuah proses perluasan pilihan bagi manusia, khususnya dalam mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat dipersentasikan oleh indikator angka harapan hidup, dimensi pengetahuan dipersentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah, sementara dimensi kehidupan yang layak dipersentasikan oleh indikator kemampuan daya beli (Badan Pusat Statistik, 2012).

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu (Laisina, 2015).

Menurut Arsyad pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan

memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Laisina, 2015).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut atautah milik penduduk wilayah lain (Sukirno 1994:105). PDRB adalah salah satu indikator yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi yang biasanya juga digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan menjadi tolak ukur dalam menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang (Laisina, 2015).

Adam Smith mengemukakan bahwa faktor manusia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan spesialisasi dalam meningkatkan produktivitas. Smith dan Richardo percaya bahwa batas dari pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan tanah. Kaum klasik juga yakin bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai akibat adanya pembentukan akumulasi modal yang bersumber dari adanya surplus dalam ekonomi. Namun demikian David Ricardo pesimis bahwa tersedianya modal dalam jangka panjang akan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi (Syam, 2014).

Teori pertumbuhan neo-klasik pertama kali dikembangkan oleh Robert Sollow. Robert Sollow lahir pada tahun 1950 di Brooklyn, ia seorang peraih nobel di bidang ilmu ekonomi pada tahun 1987. Teori neo-klasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan

dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Dalam analisis neo-klasik diyakini bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor utama yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu dan perkembangannya dari satu waktu ke waktu (Lestari, 2013).

Teori neo-klasik dipandang sebagai teori yang lebih tepat dan lebih sempurna dalam menerangkan fenomena pertumbuhan ekonomi jangka panjang kalau dibandingkan dengan teori klasik. Sebabnya adalah karena teori ini melihat bagaimana setiap faktor produksi dan perkembangan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teori ini bukan saja memperhatikan peranan tenaga kerja dalam pertumbuhan, tetapi yang lebih penting, teori ini dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan empiris mengenai peranan relatif dan modal, teknologi dan tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi (Lestari, 2013).

Teori pertumbuhan ekonomi keynes, berdasarkan pada hipotesis siklus arus uang yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian akan meningkatkan pendapatan. Pada teori ini konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan orang lain pada perekonomian yang sama. Pergerakan aktifitas perekonomian ditentukan oleh tiga hal dalam perekonomian makro yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu; produksi, permintaan, dan pendapatan. Untuk menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan dengan tiga jenis pendekatan diantaranya pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, dan pendekatan produksi (Alfianita, 2017).

Pendekatan yang sering digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional adalah dengan pendekatan pengeluaran dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran (belanja) pelaku ekonomi dalam suatu negara selama periode tertentu (Alfianita, 2017).

2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah menurut Mangkoesoebroto merupakan cerminan kebijakan pemerintah lakukan, yaitu jika pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut (Sudartomo, 2014)

Kebijakan pemerintah untuk belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas manusia dalam bentuk pelayanan masyarakat. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kuncoro, 2013).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja daerah dimaknai sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dinyatakan bahwa belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Menurut PP 71 Tahun 2010, belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis, organisasi dan fungsi. Klasifikasi belanja fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Selain itu tujuan klasifikasi belanja fungsi adalah sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja serta untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumberdaya yang terbatas.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diperbaharui oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Klasifikasi Belanja Pemerintah menurut fungsinya dibagi menjadi sembilan fungsi yaitu fungsi pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Kesembilan fungsi tersebut dikelompokkan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara.

a. Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan

Baldacci et al. menyatakan *“But a greater share of investment in human capital should be channeled toward primary education”* (bagian yang lebih besar dari investasi dalam modal manusia harus disalurkan menuju pendidikan). Masalah yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh

pemerintah adalah distribusi pendidikan yang tidak merata. Di sisi lain hubungan investasi sumber daya manusia (pendidikan) dengan pembangunan ekonomi merupakan dua mata rantai yang saling berkaitan (Sunarni, 2017).

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Hal ini dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31. Dalam pasal tersebut juga dibahas tentang kewajiban negara dalam menjamin ketersediaan bagi setiap warga negaranya (BPS, 2018). Pada saat ini, pemerintah mengalokasikan pendidikan minimal 20% dari APBN. Hal ini tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2003 Pasal 49 ayat 1 yang menyebutkan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Belanja kesehatan dapat meningkatkan pembangunan manusia melalui dua saluran : 1) pertumbuhan ekonomi, dan 2) mengurangi tingkat kematian serta meningkatkan proses pembelajaran (Aviyati dan Susilo, 2016 dalam Sunarni, 2017).

Sumber pembiayaan untuk kesehatan dibedakan menjadi dua yaitu, sumber pembiayaan dari pemerintah dan swasta. Sumber

pembiayaan dari pemerintah meliputi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan bantuan luar negeri. Sedangkan dari swasta meliputi perusahaan swasta/BUMN yang digunakan membiayai karyawannya, badan penyelenggara asuransi kesehatan, dan lembaga non pemerintah berkegiatan kesehatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan (Wasisto & Ascobat, 1986).

Sesuai dengan UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 170 ayat 1 pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil yang berguna untuk terjaminnya pembangunan kesehatan agar meningkatnya derajat kesehatan yang tinggi. Dan anggaran kesehatan pada pasal 171 ayat 1, besaran anggaran kesehatan pemerintah 5% dari APBN di luar gaji. Untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji.

c. Pengeluaran Pemerintah Fungsi Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan sebuah aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan serta pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan dalam sebuah negara. Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah diamankan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa (Bappenas, 2014).

Menurut Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional. Suharto (2008) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk mewujudkan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan (Iping, B. 2020).

Target belanja untuk perlindungan sosial dalam APBN kian meningkat tiap tahunnya, bahkan tahun ini dialokasikan hingga 12% dari total belanja pemerintah pusat. Besarnya anggaran tersebut digunakan untuk mendanai program-program pemerintah seperti Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan, Indonesia Pintar, dan masih ada beberapa program lagi yang akan diinisiasi. Total anggaran yang masing-masing mencapai nominal trilyunan ini mampu mencakup jutaan warga Indonesia. Dengan adanya banyak program perlindungan sosial ini, pemerintah bermaksud untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan yang dapat menunjang IPM di Indonesia melalui salah satu dari komponen pengukur utamanya, yaitu keadaan ekonomi yang dilihat dari kemampuan daya belinya (Hidarini, 2020).

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan pembangunan sektor lainnya. Pendidikan telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dan kesetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas telah menjadi tujuan penting dari kebijakan pembangunan. Negara dengan tingkat ketimpangan pendidikan tinggi secara konsisten menunjukkan tingkat inovasi yang lebih rendah, rendahnya tingkat efisiensi produksi, dan kecenderungan untuk mentransmisi kemiskinan lintas generasi (Winarti, 2014).

Todaro juga menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, sehingga merupakan hal fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Mulyadi menyatakan bahwa peningkatan kualitas manusia dapat dipenuhi dengan berbagai kebijakan, yaitu pembangunan pendidikan akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang,

pembangunan kesehatan mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan dan mutu pelayanan kesehatan, untuk penduduk miskin peningkatan kualitasnya dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis, menumbuhkan sikap produktif serta mendorong semangat keswadayaan dan kemandirian untuk bersama melepaskan diri dari kemiskinan menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan KB, meningkatkan keseimbangan kepadatan dan penyebaran penduduk (Dewi Novita, 2017).

Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Winarti, 2014).

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu Negara, dikatakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. (Adi Widodo dkk., 2011). Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan (Lanjouw, 2001).

Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan. Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Menurut Lanjouw, dkk, Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental. Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Seperti diungkapkan oleh Meier dan Rauch dikatakan pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. (Laisina, 2015)

Menurut Fitzsimons, teori human capital adalah teori ekonomi paling berpengaruh dari pendidikan barat, menetapkan kerangka kerja untuk kebijakan pemerintah sejak awal 1960-an. Pendidikan dan pelatihan adalah instrumen penting dalam pengembangan persediaan sumber daya manusia dari negara mana pun. Dari sudut pandang Ekonom Pembangunan, modal manusia terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan kemampuan manusia lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas. Lawanson (2009) menunjukkan bahwa kesehatan dan pendidikan secara kolektif

meningkatkan produktivitas anggota individu masyarakat. Menurut Schultz (1961) sebagaimana dikutip oleh Ijaiya dan Ijaiya (2004) ada lima cara modal manusia dapat dikembangkan melalui perawatan dan fasilitas kesehatan, pada pelatihan kerja, secara formal menyelenggarakan pendidikan di tingkat dasar, menengah dan tinggi, dan program studi untuk orang dewasa. Kelima, menjadi migrasi individu dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kesempatan kerja. Dalam menggarisbawahi peran penting pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Jhinger, (2005) berpendapat bahwa dalam arti sempit, pengeluaran untuk pengembangan sumber daya manusia adalah investasi dalam pendidikan, tetapi dalam arti luas termasuk pengeluaran untuk kesehatan dan layanan sosial di umum. (Omankhanlen, 2014)

2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Prioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. (Pake, 2018).

Todaro & Smith (2003), bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

Menurut Lains dan Pasay yang lebih menekankan aspek pendidikan dalam pembangunan manusia, Tjiptoherijanto (1989) melihat mutu manusia dari sisi lain yaitu dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumberdaya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah (Astri, 2013).

Purcal dan Cohen menyatakan bahwa, betapa paradigma kesehatan di Indonesia memang jauh tertinggal dibanding negara-negara anggota ASEAN lainnya. Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, bahkan Vietnam sejak beberapa tahun lalu mulai melihat dan menempatkan masalah kesehatan sebagai investasi jangka panjang (*long term human investment*), sementara Indonesia konsumsi itu antara lain berupa pengabaian masalah kesehatan dalam prioritas anggaran pembangunan masih saja sulit beranjak dari paradigma lama, kesehatan sekadar sebagai konsumsi. Konsekuensi dari paradigma usang kesehatan sebagai konsumsi itu antara lain berupa pengabaian masalah kesehatan dalam prioritas anggaran pembangunan (Astri, 2013).

Pembangunan bidang kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya diharapkan bisa memberi manfaat positif bagi meningkatnya angka harapan hidup (Sharpe, 2007). Bidang kesehatan juga merupakan salah satu bagian penting dalam

upaya pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Kebutuhan seluruh lapisan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ini pada dasarnya merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Todaro & Smith, 2003, bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat (kahang, 2016).

Menurut Tjiptoherijanto (1989) bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut telah diteliti oleh Javar, Abbasian dan Sahar (2002) bahwa terdapat korelasi positif antara pengeluaran kesehatan pemerintah terhadap IPM. Temuan lainnya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah disektor kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan IPM (Astri, 2013). Hal ini sejalan dengan temuan Stephen O dan I. Oluranti (2011) bahwa pada kondisi jangka panjang, pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada modal pembangunan manusia dan diperlukan adanya penyaluran belanja modal Negara pada sektor pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan modal pembangunan manusia dan berakhir pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara (hakim, 2015).

Menurut Tjiptoherijanto melihat mutu manusia dari sisi kesehatan di mana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh

pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam undang-undang disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia sehingga pemerintah memiliki tanggungjawab memenuhi kesehatan setiap rakyatnya. Setiap penduduk berhak memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya ini merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional, maka wajar jika kesehatan dapat disebut menjadi investasi pemerintah pada belanja/pengeluaran pembangunan untuk pengembangan sumber daya manusia (Astri, Nikensari, dan Kuncara, 2013).

Menurut model pertumbuhan Endogen yang ditawarkan oleh Lucas (1988), investasi Pendidikan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Musgrave dan Rostow mengembangkan model di bawah penyebab pertumbuhan pengeluaran publik. Mereka mengklaim bahwa pengeluaran publik merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi. Sektor publik awalnya memberi infrastruktur ekonomi seperti jalan, kereta api, pasokan air, dll. Dengan pertumbuhan ekonomi, keseimbangan investasi publik bergerak menuju pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan pengeluaran untuk layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan (Muritala & Taiwo, 2011).

Craigwell et al. (2012) dan Kim & Lane (2013) yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan telah terbukti menurunkan angka kematian bayi yang pada akhirnya meningkatkan tingkat harapan hidup. Menurut beberapa ekonom, pengeluaran kesehatan akan menurunkan PDB karena mengalihkan sumber daya dari investasi produktif.

Konsep baru modal manusia oleh Becker (1964) telah membuka rute lain untuk menunjukkan pengaruh pengeluaran kesehatan terhadap PDB. Dalam arah baru ini, pengeluaran kesehatan dengan memperbaiki indikator kesehatan akan meningkatkan inventaris sumber daya manusia dan pertumbuhan PDB di negara-negara (Razmi, 2012).

Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, kesehatan juga dapat dilihat dari sebagai komponen pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang vital sebagai input produksi agregat, peran gandanya sebagai input produksi agregat, peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003). Schultz berpendapat bahwa apakah kesehatan yang buruk memiliki dampak pada total faktor produktivitas, yang juga terkait dengan tingkat output suatu negara. Jika kesehatan seseorang tidak cukup baik untuk bekerja, maka, orang ini keluar dari angkatan kerja. Ini akan memiliki refleksi akhir pada pertumbuhan ekonomi. Jika orang mulai tidak bekerja karena kondisi kesehatan mereka, akan ada penurunan dramatis dalam tingkat output, yang juga menunjukkan hubungan yang kuat antara kesehatan dan pertumbuhan. Dapat dianggap bahwa kesehatan adalah indikator penting untuk produktivitas (Ercelik, 2018)

Penelitian Strauss dan Thomas (1998) menunjukkan bahwa beberapa bukti yang terkait dengan produktivitas dan kesehatan karena menurut Strauss dan Thomas (1998), ada hubungan yang kuat antara kesehatan dan pembangunan ekonomi. Dalam penelitian ini, dinyatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara pasar tenaga kerja dan masalah kesehatan. Poin penting adalah bahwa pertumbuhan ekonomi diperoleh dari efisiensi individu yang sehat (Ercelik, 2018).

2.2.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengeluaran Sosial memainkan peran utama untuk mencapai tujuan pembangunan untuk membangun masyarakat yang inklusif secara sosial, sehat secara ekonomi, dan berlabuh secara demokratis. Telah ada banyak upaya untuk mengukur kualitas hidup masyarakat di seluruh negara di dunia melalui Indeks Pembangunan Manusia dalam UNDP, berbagai tahun. Perkembangan manusia yang tidak merata antar negara ditandai oleh beberapa penelitian di India. Beberapa studi dengan metodologi kuantitatif yang berbeda menyimpulkan bahwa pengeluaran dalam sektor sosial merupakan penentu penting pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran sosial semacam itu meningkat produktivitas dengan menyediakan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan menyelaraskan pribadi dan perhatian sosial, (Arora, 2001).

Peningkatan dalam pengeluaran sektor sosial harus dianggap sebagai salah satu prioritas untuk mempromosikan efisiensi dalam pertumbuhan dan pembangunan. Anggaran direkomendasikan untuk dialokasikan secara memadai untuk memberikan dukungan bagi kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan Negara, (mittal, 2016).

Hasil kajian Ramirez (1998) telah membuktikan bahwa ada hubungan positif yang kuat antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian pengeluaran pemerintah untuk sektor pelayanan sosial dan tingkat pendidikan terbukti pula mempunyai peran penting sebagai penghubung yang menentukan kekuatan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (hakim, 2015).

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan IPM dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan memberikan gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Dewi, N 2017).

Kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat

mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah. (Usmaliadanti, 2011) Menurut Soebeno, Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dapat dijelaskan melalui 2 (dua) jalur yaitu Jalur pertama adalah melalui kebijakan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk subsektor sosial yang terangkum dalam belanja modal. Besarnya pengeluaran tersebut mengindikasikan besarnya peran pemerintah terhadap pembangunan manusia (Mirza, 2012).

Maka diharapkan belanja perlindungan sosial dapat memperkuat ruang fiskal dalam meningkatkan IPM di suatu daerah. Menurut hasil penelitian Mailassa`adah (2017), pengeluaran pemerintah di bidang perlindungan sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan IPM. Semakin besar pengeluaran tersebut maka semakin tinggi kecepatan perkembangan IPM (Hidarini, 2020).

Pengeluaran sosial yang merupakan bagian dari Pengeluaran Publik mencakup pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, jaminan sosial & kesejahteraan, pasokan air & sanitasi, kesejahteraan SC, ST & OBC dll. Ini memainkan peran penting dalam fungsi ekonomi di semua tahapan pembangunan ekonomi. Ada konsensus yang berkembang di antara para peneliti bahwa intervensi oleh negara-negara melalui kebijakan kesejahteraan sosial dapat mempengaruhi kinerja ekonomi (Singh, 2018).

Dengan demikian, pengembangan sektor sosial telah dianggap sebagai prasyarat penting untuk pembangunan manusia yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian (Sen, 1989) karena

pengembangan sektor sosial meningkatkan peluang kerja, tingkat pendapatan, pertumbuhan produktivitas, kemajuan teknologi dan karenanya membantu untuk meningkatkan kualitas hidup orang (Singh, 2018). Selain itu Lindert, Peter mengemukakan bahwa negara-negara bagian yang menghabiskan banyak uang untuk sektor sosial telah melihat pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara yang pengeluarannya lebih sedikit (Ashwani S, 2016).

Kemampuan manusia atau kualitas hidup orang yang akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan karenanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Strauss, 1998). Peningkatan pertumbuhan output, di sisi lain, memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan porsi pengeluaran untuk pembangunan sektor sosial yang memiliki implikasi untuk pembangunan sosial-ekonomi jangka panjang (Pattayat, 2017). Menurut Ehrlich, pengembangan dan akumulasi sumber daya manusia sebagian besar dapat dicapai melalui investasi besar-besaran di sektor sosial (Iheoma, 2012).

Teori yang dikemukakan oleh Kuznet dimana salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output per kapitas (Todaro:1998). Pertumbuhan output yang dimaksudkan adalah PDRB per kapitas, tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan pola konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan. Artinya semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pertumbuhan output per kapita dan mengubah pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan semakin tinggi. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan indeks pembangunan manusia karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam indeks pembangunan manusia yang disebut indikator pendapatan (Tjodi, 2018).

2.2.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Adapun hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dalam penelitian yang dilakukan oleh (Lumbantoruan dan Hidayat: 2014) menyatakan bahwa ketika pendapatan atau PDB per kapita rendah akibat pertumbuhan ekonomi yang rendah, menyebabkan pengeluaran rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia menjadi turun (Tjodi, 2018).

Instrumen penggerak utama dalam pembangunan manusia adalah pertumbuhan ekonomi (Ranis et.al, 2000). Karakteristik pertumbuhan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan PDRB per kapita, PDRB per kapita yang tinggi akan mengubah pola konsumsi dalam memenuhi kebutuhan (Todaro 1998). Ini berarti bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi daya beli masyarakat. Ini akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di mana salah satu indikatornya adalah paritas daya beli. (Ranis, Stewart, dan Ramirez 2000) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan kecuali jika didahului atau disertai dengan peningkatan pembangunan manusia, (Andriyani, 2019)

Daerah yang memiliki pendapatan tinggi dapat meminimalkan penurunan kualitas pembangunan manusia (Brata, 2002). artinya bahwa ketika pendapatan suatu daerah mengalami peningkatan atau pertumbuhan ekonomi meningkat itu akan berpengaruh pada peningkatan indeks pembangunan manusia atau meminimalisir penurunan IPM di suatu daerah.

Diungkapkan oleh (Ranis, Stewart, dan Ramirez 2000) bahwa alat penggerak utama dalam pembangunan manusia adalah pertumbuhan

ekonomi. Ada dua mekanisme untuk hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia. Mekanisme pertama adalah kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh Produk Domestik Bruto (PDB) atau di tingkat regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ada tiga cara berkontribusi pertumbuhan ekonomi ke Indeks Pembangunan Manusia, yaitu: (i) alokasi belanja rumah tangga, (ii) alokasi belanja pemerintah dan (iii) alokasi belanja lembaga non-pemerintah. Kecenderungan rumah tangga untuk membelanjakan pendapatan bersih mereka dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia melalui makanan, minuman, pendidikan dan kesehatan. Jika tingkat pendapatan per kapita rendah maka pengeluaran untuk kebutuhan pembangunan manusia juga akan rendah. Peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia melalui alokasi belanja publik, terutama di sektor produktif. Kebijakan yang berhasil memerlukan fokus awal pada pengembangan manusia, tidak hanya karena dampak langsungnya tetapi juga karena efek umpan baliknya pada mempertahankan pertumbuhan ekonomi (Suri et.al, 2011).

Faktor yang diduga berpengaruh terhadap IPM adalah Produk Domestik Bruto (PDRB). Tingginya PDRB akan mengubah pola konsumsi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi suatu barang berkaitan erat dengan IPM karena daya beli merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yaitu indikator pendapatan (Todaro, 2006). (Khodabakhshi, 2011) menemukan bahwa PDB memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi yang baik

ditunjukkan oleh kenaikan PDB dalam skala nasional dan PDRB skala regional/daerah setiap tahunnya. Kenaikan pertumbuhan ekonomi hendaknya diiringi oleh pembangunan manusia di dalamnya.

Menurut Putong Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat sehingga IPM disuatu daerah justru juga mengalami peningkatan. Dimana semakin tinggi pendapatan nasional atau daerah maka semakin besarlah harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru. Pendapatan yang tinggi tercermin dari tingginya pendapatan perkapita dan tumbuh secara positif dan berarti. Maka secara relatif semakin baik pertumbuhan ekonomi, maka semakin besarlah harapan untuk tidak menganggur sehingga akan mendorong pemerataan pendapatan perkapita sehingga mendorong meningkatnya indeks pembangunan manusia (dewi, N 2017).

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Mirza, 2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dengan elastisitas positif sebesar 0,153434 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Sedangkan dalam penelitian ini tidak ditemukan pengaruh positif antara pertumbuhan ekonomi terhadap IPM.

Menurut Soebeno, Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dapat dijelaskan melalui 2 (dua) jalur yaitu Jalur pertama adalah melalui kebijakan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk subsektor sosial yang terangkum dalam belanja modal. Besarnya pengeluaran tersebut

mengindikasikan besarnya peran pemerintah terhadap pembangunan manusia (Mirza, 2012).

Sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini pada akhirnya akan berimbas pada terbatasnya upa/pendapatan yang mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah (Winarti, 2014).

Menyiratkan bahwa negara / Daerah dapat masuk ke dalam siklus baik pertumbuhan tinggi dan peningkatan HD besar, atau siklus setan pertumbuhan rendah dan peningkatan HD rendah (Ranis , 2004; 2000)

Ranis, Stewart, dan Ramirez (2004) di mana pertumbuhan ekonomi telah secara signifikan dipengaruhi oleh pengembangan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang kuat secara substansial membuka jalan bagi pengembangan sumber daya manusia.

Sudah banyak literatur yang menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Melalui investasi dalam sumber daya manusia diyakini dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Seperti yang ditunjukkan Solow, pertumbuhan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan PDB per kapita (Todaro 1998). PDRB adalah salah satu indikator kinerja ekonomi di suatu daerah. Menurut (Mustafa et.al, 2017) pembangunan manusia berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menambah bukti bahwa perbaikan dalam pembangunan manusia meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Provinsi yang

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas lebih mampu bertahan daripada provinsi lain. Sebaliknya, provinsi yang memiliki pendapatan tinggi dapat meminimalkan penurunan kualitas pembangunan manusia (Adriyani, 2018).

Ginting et. all (2008), yang menyatakan bahwa kondisi negara berkembang hingga akhir 1999 mengindikasikan sumber daya peran pembangunan manusia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Meskipun secara empiris, studi tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi pada sumber daya manusia masih kurang (Ramirez, et al, 1998). Namun demikian, penelitian ini lebih fokus. Mengamati pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi (Iskandar, 2017).

2.3. Tinjauan Empiris

Beberapa hasil studi empiris lainnya yang menyelidiki hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), menemukan hasil yang berbeda diantara para peneliti. Sebagian peneliti berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM. Sebagian lainnya berpendapat bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan diantara hubungan variabel tersebut. Sebagian peneliti lainnya juga berpendapat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun sebagian lainnya juga berpendapat bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan diantara hubungan variabel tersebut.

Tabel 2.1 Ringkasan Studi Empiris

Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
Mailassa`- adah, (2017)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan Dan Sektor Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, • Sektor kesehatan • Sektor perlindungan sosial • indeks pembangunan manusia 	Pendekatan kuantitatif data panel periode 2009-2013, <i>Random Effect Model</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil estimasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). • Dengan demikian semakin besar pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial semakin tinggi kecepatan perkembangan IPM.
Tjodi (2018)	Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi (studi di provinsi sulawesi utara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran sektor pendidikan, kesehatan, belanja modal, • pertumbuhan ekonomi, dan • IPM 	Model <i>path analysis</i> (perluasan rekresi linear berganda). menggunakan data sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian sub-struktur 1 menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. • Sub-struktur II menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM, • Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Kemudian nilai koefisien jalur menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel intervening untuk variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan belanja modal terhadap IPM.
Adriyanti (2019)	Cointegration analysis of economic growth and human development index of districts in central java	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • Indeks pembangunan manusia 	metode <i>Klassen Tipology</i> data sekunder di Jawa Tengah selama periode 2004 - 2013.	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan <i>Tipologi Klassen</i> ada 14 kabupaten / kota yang termasuk dalam kategori daerah yang berkembang cepat dan tumbuh cepat (Kuadran I), 6 di antaranya adalah daerah perkotaan. Di kuadran II atau daerah berkembang cepat ada 10 kabupaten, 4 kabupaten berkembang tetapi tertekan

				(Kuadran III) dan 7 kabupaten yang relatif terbelakang (Kuadran IV). Sementara itu, hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa ada keseimbangan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Agarwal (2015)	Social Sector Expenditure and Human Development: Empirical Analysis of Indian States	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran sektor sosial, • pendapatan per kapita, dan • IPM 	Analisis regresi Data sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian bahwa pengeluaran sektor sosial dan pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap IPM (indeks pembangunan manusia)
Patel (2019)	Public Education Expenditure and Its Impact on Human Resource Development in India: An Empirical Analysis	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Pembangunan manusia 	Granger Causality Test	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan pengaruh pengeluaran pendidikan publik pada Pengembangan Sumber Daya Manusia di India.
Iheoma (2012)	Social Spending and Human Development in Selected West African Countries	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran sosial (pendidikan dan kesehatan) 	Model penyesuaian parsial efek tetap dan regresi	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil menunjukkan bahwa walaupun pengeluaran bantuan sosial kesehatan penting dalam menjelaskan pembangunan manusia di negara-negara ini baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, pengeluaran pendidikan tidak
Pakdaman (2019)	The Effect of Health Expenditure on Human Development Index (HDI) in Iran, 2001–2014	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan dan • Indeks Pembangunan manusia 	model deret waktu dalam ekonometrik dan VAR self-regression econometrics, teknik kausalitas Granger dianalisis.	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
Amalia, Bestari (2019)	The effect of Government Spending for Education and Health Sectors on Human Development Index in West Sumatra.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Kesehatan, dan • IPM 	Regresi, data sekunder dan data panel	<ul style="list-style-type: none"> • Temuan penelitian adalah (1) bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, (2) pengeluaran pemerintah untuk kesehatan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Sumatera Barat.
Pake. (2018)	Pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten halmahera utara.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan, kesehatan, dan • Indeks pembangunan manusia 	Model analisis regresi linier berganda. data sekunder 2007-2016	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan memiliki tanda positif namun kurang berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara. Pengeluaran pemerintah pada

				bidang kesehatan memiliki tanda positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara bersama-sama pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan bertanda positif dan berpengaruh secara signifikan.
Hadi (2018)	Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah menurut Fungsi terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Kontrol	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja pemerintah 9 fungsi, • Jumlah penduduk dan • Indeks pembangunan manusia. 	Metode kuantitatif, data sekunder kabupaten/kota se Indonesia tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Diperoleh hasil bahwa belanja yang dapat berpengaruh terhadap IPM yaitu belanja menurut fungsi ekonomi, lingkungan hidup, pelayanan umum, dan pendidikan. Sedangkan belanja menurut fungsi kesehatan, ketertiban dan keamanan, pariwisata dan kebudayaan, perlingungan sosial serta perumahan dan fasilitas umum tidak berpengaruh terhadap IPM. Selain itu jumlah penduduk juga tidak mempengaruhi nilai IPM dalam suatu daerah.
Sanggalang (2015)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan, • Kesehatan, dan • IPM 	Regresi berganda, data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel belanja pemerintah dibidang pendidikan berpengaruh positif dan variabel belanja pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif.
Mirza (2012)	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap IPM di Jawa Tengah Tahun 2006-2009	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan, • Pertumbuhan ekonomi, • belanja modal • IPM 	Data sekunder dan data panel tahun 2006-2009 Model penelitian: <i>fixed effect model</i> dengan <i>random effect model</i>	<ul style="list-style-type: none"> • IPM mengalami peningkatan mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan pemerintah. Sedangkan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM
Sunarni (2017)	Pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota se-indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja fungsi pendidikan, kesehatan, ekonomi • PDRB • IPM 	pengujian hipotesis (hypothesis testing) penelitian kualitatif dengan data sekunder. Sampel penelitian adalah 212 Kabupaten/Kota untuk tahun 2010-2012	<ul style="list-style-type: none"> • Menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah menurut fungsi dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang nyata terhadap IPM pada kabupaten/kota di Indonesia pada kurun waktu 2010-2012

Mittal (2016)	Social Sector Expenditure and Human Development of Indian States	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran sektor sosial • Indeks pembangunan manusia 	<p>Korelasi dan regresi sederhana.</p> <p>Data dari Reserve Bank of India, Kementerian Statistik dan Program Implementasi, Pemerintah India, Sensus India, RGI.</p>	menemukan bahwa pengeluaran di sektor sosial berdampak positif pada IPM di tingkat negara bagian India
Haile dan Nino (2018)	Does social spending improve welfare in low-income and middle-income countries?	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja sektor sosial 	two-stage least squares (2SLS) and fixed-effects (FE) framework data longitudinal dari 55 negara berpenghasilan rendah dan menengah dari tahun 1990 hingga 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Menyimpulkan bahwa pengeluaran sosial pemerintah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan agregat dan pembangunan manusia di negara berkembang.
Astri, <i>et al.</i> (2013)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan • Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 	Model regresi berganda, Metode statistik inferensial (induktif), data sekunder time series	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap IPM. • Tingkat pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan belum mencapai 5 persen dari PDRB, maka pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. • Pengeluaran pendidikan dan kesehatan Secara serempak berpengaruh positif terhadap IPM.
Arifin dan Yuli (2015)	Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks pembangunan manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran pemerintah sektor (kesehatan dan pendidikan) • pertumbuhan ekonomi 	Metode <i>explanatory</i> Uji kausalitas data <i>cross section</i> dan <i>time series</i> pada 38 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2013.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Timur Tahun 2006-2013 • Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IIPM di Jawa Timur Tahun 2006-2013 • Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Timur Tahun 2006-2013.
Laisina (2015)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap • pertumbuhan ekonomi (PDRB) 	Penelitian deskriptif dengan analisis alur, data sekunder di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian, pengeluaran pemerintah di Sektor pendidikan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan di sektor kesehatan tidak memiliki pengaruh. Berdasar

				<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan ke pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia bersifat positif. Sedangkan di sektor kesehatan bersifat negatif.
Akbar (2016)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Dan Bantuan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun (2008 – 2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran pendidikan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan bantuan sosial • Indeks pembangunan manusia (IPM) 	Metode Regresi data panel, data sekunder di lima kabupaten provinsi Yogyakarta tahun 2008-2014	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian ini adalah variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif yang signifikan pada indeks pembangunan manusia • Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, infrastruktur dan bantuan sosial tidak berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode waktu tersebut.
Kahang dkk(2016)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan • Indeks pembangunan manusia (IPM) 	Model regresi linier berganda, data uji asumsi klasik menggunakan SPSS 22 dengan data sekunder Tahun 2009-2014	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor pengeluaran pemerintah pendidikan secara signifikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. • Sektor pengeluaran kesehatan pemerintah tidak signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur.
Pattayat, S. (2017)	Social Sector Development and Economic Growth in Haryana	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor Sosial • Pertumbuhan ekonomi 	Model regresi kointegrasi. Data <i>times series</i> 1985-2016.	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat korelasi yang tinggi antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran sektor sosial
Ezcurra (2011).	Decentralization of social protection expenditure and economic growth in the OECD	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran perlindungan sosial • Pertumbuhan ekonomi 	Model pendekatan standar. Data sekunder 20 negara periode 1990-2005	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil menunjukkan dampak positif pengeluaran perlindungan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi di
Nikmah (2020)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan. Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Islam Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • Pengeluaran pendidikan • Pengeluaran kesehatan • Pengeluaran perlindungan sosial 	Metode regresi panel, data <i>time series</i> dan <i>crossection</i> tahun 2015-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM • Pengeluaran pendidikan berpengaruh negatif terhadap IPM • Pengeluaran kesehatan berpengaruh positif, tidak signifikan terhadap IPM • Pengeluaran perlindungan sosial berpengaruh positif terhadap IPM.

Winarti (2014)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012”	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran pendidikan • Kemiskinan • PDB • Indeks pembangunan manusia 	Model regresi linear berganda, data <i>time series</i> tahun 1992-2012	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM • PDB berpengaruh positif terhadap IPM • Pengeluaran pendidikan berpengaruh negatif terhadap IPM
Noviata-mara (2019)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • Tingkat pengangguran • Indeks pembangunan manusia 	Model regresi linear berganda data sekunder <i>time series</i> tahun 2011-2017.	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap IPM • Pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap IPM
Iqbal, M (2020)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro Tahun 2007-2017 dalam Perspektif Ekonomi Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • Pengeluaran pemerintah • Indeks pembangunan manusia 	Model regresi linear berganda data sekunder <i>time series</i> tahun 2007-2017.	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM • Pengeluaran pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM • Pengeluaran kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM
Imron (2018)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur 2011-2016	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • Pengeluaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur • Indeks pembangunan manusia 	Model regresi data panel data sekunder tahun 2011-2016	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran kesehatan dan infrastruktur berpengaruh positif terhadap IPM • Pengeluaran pendidikan berpengaruh negatif terhadap IPM
Laode (2020)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara (2015-2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • Kemeskinan • Pengeluaran pendidikan • Indeks pembangunan manusia 	Model regresi data panel periode 2015-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM • Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM • Pengeluaran pendidikan berpengaruh negatif terhadap IPM.

Eggoh (2015)	Education, Health And Economic Growth In African Countries	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Kesehatan • Pertumbuhan ekonomi 	Model regresi dinamik panel data <i>cross-section</i> tahun 1996-2010	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
Bakti, T (2018)	Analysis Of The Influence Of Direct Expenditure, Education, And Labor On Economic Growth In North Maluku	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pendidikan • Tenaga kerja • Pertumbuhan ekonomi 	Model regresi linear berganda data panel tahun 2015-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi • Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Beberapa hasil studi empiris diatas menyelidiki hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia dan hasil diatas ada beberapa temuan yang sejalan dengan penelitian ini seperti halnya temuan Nikmah (2020) hasil penelitiannya menemukan pengeluaran pendidikan fungsi pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Hal tersebut disebabkan karena ketidak seimbangan pengalokasian belanja fungsi pendidikan pada belanja pegawai dan barang jasa dan belanja modal. Selain itu, hasil temuan Winarti (2014) dan Imron (2018) juga temuan ini bahwa pengeluaran pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia.

Beberapa temuan tentang pengeluaran pendidikan pada fungsi kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia sejalan dengan penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Pakdaman, (2019) dan Amalia, (2019) menemukan memiliki pengaruh antara pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia. Kemudian untuk variabel pengeluaran fungsi perlindungan sosial yang sejalan dengan temuan penelitian ini yaitu Mittal, (2016) dan Mailassa'adah, (2017) dimana pengeluaran pemerintah fungsi perlindungan sosial memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Kerangka pikir penelitian ini didasarkan pada teori dan studi empiris yang telah dikemukakan sebelumnya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang kuat antara pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan IPM, serta keterkaitan antara pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial terhadap peningkatan IPM melalui pertumbuhan ekonomi. Peningkatan Pengeluaran pemerintah pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan tingkat pendapatan masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

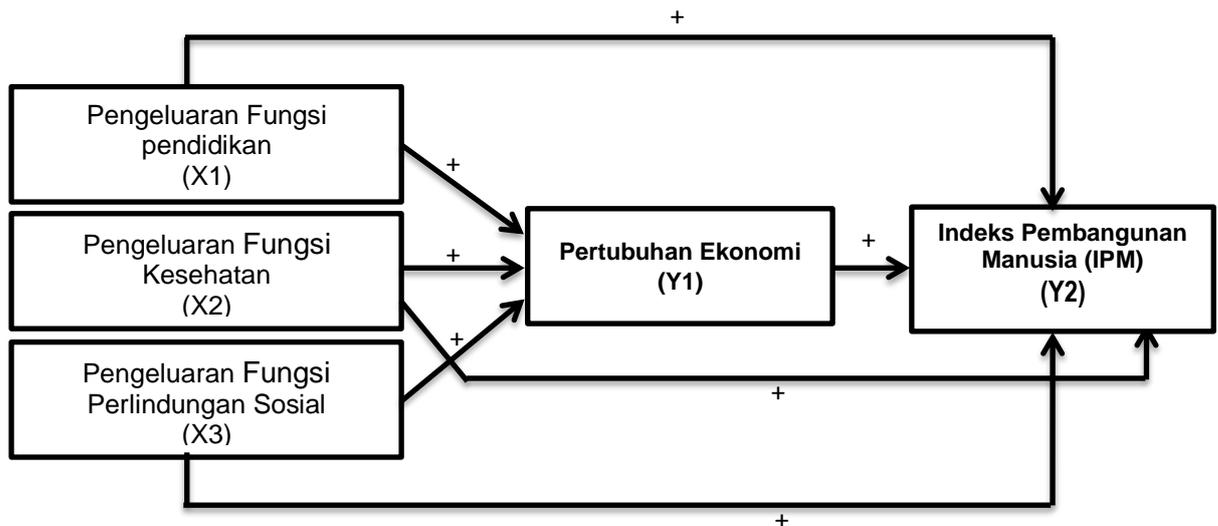
Variabel pendidikan dari penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan yang positif terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi. Teori modal manusia menjelaskan proses dimana pendidikan memiliki pengaruh positif pada indeks pembangunan manusia. Karena modal manusia memiliki hubungan yang positif dengan produktivitas dan pendapatan sehingga selanjutnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, maka implikasinya pendidikan juga memiliki hubungan yang positif dengan indeks pembangunan manusia. Sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Variabel kesehatan memiliki peranan penting

dalam modal manusia Karena manusia yang memiliki tingkat pendidikan tinggi lantas tidak memiliki kesehatan maka dapat mengurangi produktivitas sehingga variabel kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan manusia dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya pengeluaran perlindungan sosial dalam hal ini pengeluaran fungsi perlindungan sosial bagi suatu daerah, suatu kebijakan yang sangat berpengaruh secara langsung indeks pembangunan manusia daerahnya karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan gilirannya dapat meningkatkan konsumsi hasil dari tambahan pendapatan dan meningkatkan produktivitas lewat perlindungan sosial seperti bantuan tunai untuk masyarakat miskin, pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Meningkatnya konsumsi dan pendapatan dapat berpengaruh terhadap paritas daya beli dan pada gilirannya dapat berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Pengeluaran Pemerintah merupakan komponen relatif paling kecil dibanding pengeluaran yang lain, namun efek yang ditimbulkan cukup besar, baik sebagai fungsi alokasi, distribusi, maupun stabilisasi. Bertambahnya pengeluaran pada modal manusia oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut akan berdampak pada semakin tingginya pengetahuan dan tingkat kesehatan maka berdampak pada produktivitas. Peranan manusia dalam pembangunan ekonomi terletak di dalam peningkatan laju pertumbuhan perekonomian, penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan standar kehidupan dan pada gilirannya akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka peneliti mencoba untuk mengembangkan sebuah model penelitian. Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan dan untuk memperjelas kerangka pikir penelitian, maka hubungan-hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1
Kerangka Pikir Penelitian Kabupaten Gowa

Pengeluaran fungsi pendidikan diyakini berdampak positif terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pengeluaran pendidikan akan berdampak terhadap peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan sehingga pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat juga ikut mengalami peningkatan. Kondisi tersebut akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Pengeluaran fungsi kesehatan diyakini berdampak positif terhadap IPM dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pengeluaran kesehatan akan

bedampak terhadap peningkatan angka harapan hidup dan pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kapasitas dan kualitas kerja masyarakat. Kondisi tersebut pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Pengeluaran perlindungan asosial diyakini berdampak positif terhadap IPM dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pengeluaran perlindungan sosial akan berdampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat dan pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

3.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian teoritis dan studi empiris yang dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diduga pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa.
2. Diduga pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa.
3. Diduga pengeluaran pemerintah fungsi perlindungan sosial berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa.